

ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT. BPR Ganto Nagari 1954

Immu Puteri Sari dan Dwi Nova Azana
Fakultas Ekonomi UMSB

Abstrak

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan. Penggunaan SAK-ETAP bagi Bank Perkreditan Rakyat bertujuan untuk mempermudah BPR dalam menerapkan standar akuntansinya namun tetap memperhatikan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam neraca pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 Lubuk alung pada tahun 2015.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisis dalam proses kegiatan penelitian menggunakan daftar pertanyaan untuk pengurus dan pengelola PT. BPR Ganto Nagari 1954 berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam neraca yang diterapkan oleh PT. BPR Ganto Nagari 1954 dan kemudian dideskripsikan sesuai dengan teori dan kepustakaan yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan neraca pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR yaitu PT. BPR Ganto Nagari sudah melengkapi pos-pos umum yang harus disajikan dalam neraca seperti pos-pos yang terdapat dalam akuntansi aset, kewajiban dan ekuitas. Berdasarkan pada Pedoman Akuntansi BPR yang telah disesuaikan dengan SAK ETAP terdapat tiga pokok kebijakan akuntansi yang berlaku dalam neraca adalah tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pos-pos yang ada pada neraca. Sesuai dengan hasil pernyataan yang ditulis berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR telah diisi oleh orang yang bertanggungjawab (bagian keuangan dari PT. BPR Ganto Nagari 1954), masih terdapat beberapa pernyataan yang belum diterapkan pada PT. BPR Ganto Nagari 1954. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah dalam penyusunan laporan keuangan khususnya neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954 lebih mematuhi dan menerapkan Pedoman Akuntansi BPR yang telah disesuaikan dengan SAK ETAP sepenuhnya agar neraca yang disajikan jelas sehingga dapat dipahami, relevan, diandalkan dan dapat dibandingkan.

Kata kunci: Laporan Keuangan, SAK ETAP, dan PT. BPR Ganto Nagari 1954

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi dalam satu kesatuan. Proses akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang terjadi sampai pada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan. Untuk mencapai kualitas tersebut, suatu laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di Indonesia, prinsip akuntansi ini disusun dalam standar akuntansi keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik (IAI).

Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/37/DKBU-Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR pada tanggal 31 Desember 2009, maka Bank Indonesia menetapkan standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan SAK-ETAP yang diterapkan sejak 1 Januari 2010 namun berlaku efektif 1 Januari 2011.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan. Penggunaan SAK-ETAP bagi Bank Perkreditan Rakyat bertujuan untuk mempermudah BPR dalam menerapkan standar akuntansinya namun tetap memperhatikan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan dibawah pengawasan Bank Indonesia yang dalam hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Fungsi, Kegiatan BPR, dan Larangan kegiatan BPR

Menurut Manurung (2004:135), fungsi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke Bank Umum.
2. Membantu pemerintah untuk mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselarasi pembangunan di daerah pedesaan dapat lebih dipercepat.
3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan yang dilakukan BPR untuk menjalankan fungsinya antara lain :

- a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerima tabungan mereka dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Adapun menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c) Melakukan usaha penyertaan modal
- d) Melakukan usaha perasuransian
- e) Melaksanakan usaha lain diluar usaha yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang

Tujuan Pendirian BPR

Menurut Irmayanto (2004:103) pendirian BPR memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
- b. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang.
- c. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang yang relatif rendah pendidikannya.
- d. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 17 Juli 2009 telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterapkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Namun, regulator dapat menetapkan entitas yang mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan untuk menggunakan SAK-ETAP (Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat:2010). Menurut SAK IAI (2013:115) SAK-ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. SAK ETAP diterbitkan karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dinilai terlalu rumit dan akan menyulitkan pengusaha berskala kecil dan menengah. Mengingat jenis usaha di Indonesia sebagian besar berskala kecil dan menengah, maka SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS for SME (*Small Medium Enterprises*) dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas.

Komponen Laporan Keuangan BPR

Dalam Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (2010:15), adapun komponen-komponen laporan keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - a. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
4. Laporan arus kas, dan

5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan dan informasi penjelasan lainnya
Menurut Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, 2010:12), penyajian laporan keuangan sebagai berikut:
 1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
 3. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang dari kegiatan utama BPR dan kegiatan lainnya.
 4. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian usaha sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca sesuai dengan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya.

Akuntansi Aset

Dalam Pedoman Akuntansi BPR dijelaskan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi dimasa depan (Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, 2010:19). Pos-pos yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut:

- a. Kas
- b. Kas dalam valuta asing
- c. Sertifikat Bank Indonesia
- d. Pendapatan bunga yang akan diterima
- e. Penempatan pada bank lain (giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito)
- f. Kredit
- g. Agunan yang di ambil alih
- h. Aset tetap dan inventaris
- i. Aset tak berwujud
- j. Aset lain-lain

Akuntansi Kewajiban

Akuntansi kewajiban adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi. Pos-pos kewajiban yang umum dimiliki BPR adalah:

- a. Kewajiban segera
- b. Utang bunga
- c. Utang pajak
- d. Simpanan
- e. Simpanan dari bank lain
- f. Pinjaman diterima
- g. Dana setoran modal-kewajiban

- h. Kewajiban imbalan kerja
- i. Pinjaman subordinasi
- j. Modal pinjaman
- k. Kewajiban lain-lain

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atau aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi tersebut menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Komponen ekuitas untuk BPR terdiri dari:

- a. Modal
- b. Dana setoran awal-ekuitas
- c. Laba atau rugi yang belum direalisasi
- d. Surplus revaluasi aset tetap
- e. Saldo laba

METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 yang berada di Jl. Jendral Sudirman No. 16 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada Desember 2016 – Maret 2017.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007:5) “Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)
- 2) Penelitian lapangan (*field research*)
- 3) Dokumentasi

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data primer
- b) Data sekunder

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari PT. BPR Ganto Nagari 1954 yang berupa Laporan Keuangan periode 2015.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang diambil melalui survei. Dimana di dalam analisa deskriptif ini melakukan analisis dalam proses kegiatan penelitian menggunakan daftar pertanyaan untuk pengurus dan pengelola BPR yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan yang diterapkan oleh PT. BPR Ganto Nagari 1954 kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan tabel perbandingan penyajian neraca SAK ETAP dan SAK BPR dengan penyajian neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954.

Tabel.1

Perbandingan Penyajian Neraca menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan Penyajian Neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954

No.	Akun pada Neraca	SAK ETAP	SAK BPR	Hasil Penelitian	Ket.
1.	Aset	Aset minimal menyajikan pos-pos berikut: a. Kas dan setara kas b. Piutang usaha dan piutang lainnya c. Persediaan d. Properti investasi e. Aset tetap f. Aset tidak berwujud	Pos-pos aset yang disajikan oleh BPR: a. Kas b. Kas dalam valuta asing c. Sertifikat Bank Indonesia d. Pendapatan bunga yang akan diterima e. Penempatan pada Bank lain f. Kredit g. Agunan yang di ambil alih h. Aset tetap dan inventaris i. Aset tidak berwujud j. Aset lain-lain	Aset menyajikan pos-pos: a. Kas b. Kas dalam valuta asing c. Sertifikat Bank Indonesia d. Pendapatan bunga yang akan diterima e. Penempatan pada Bank lain f. Kredit g. Agunan yang di ambil alih h. Aset tetap dan inventaris i. Aset tidak berwujud j. Aset lain-lain	Sesuai
2.	Kewajiban	Kewajiban minimal menyajikan pos-pos berikut: a. Utang usaha dan utang lainnya b. Aset dan kewajiban lainnya c. Kewajiban diestimasi	Pos-pos kewajiban yang disajikan oleh BPR: a. Kewajiban segera b. Utang bunga c. Utang pajak d. Simpanan e. Simpanan dari Bank lain f. Pinjaman diterima g. Dana setoran modal-kewajiban h. Kewajiban imbalan kerja i. Pinjaman subordinasi j. Modal pinjaman k. Kewajiban lain-lain	Kewajiban menyajikan pos-pos: a. Kewajiban segera b. Utang bunga c. Utang pajak d. Simpanan e. Simpanan dari Bank lain f. Pinjaman diterima g. Dana setoran modal-kewajiban h. Kewajiban imbalan kerja i. Pinjaman subordinasi j. Modal pinjaman k. Kewajiban lain-lain	Sesuai
3.	Ekuitas	Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya	Pos-pos ekuitas yang disajikan oleh BPR: a. Modal b. Dana setoran modal-ekuitas c. Laba/rugi yang belum direalisasi d. Surplus revaluasi aset tetap e. Saldo laba	Ekuitas menyajikan pos-pos: a. Modal b. Dana setoran modal-ekuitas c. Laba/rugi yang belum direalisasi d. Surplus revaluasi aset tetap e. Saldo laba	Sesuai

Sumber: SAK BPR, PA BPR dan Neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954

Analisis Perbandingan Penyajian Neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954 dengan Neraca Menurut SAK ETAP

Secara umum penyajian neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954 sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP. Dasar pencatatan neraca pada komponen aset PT. BPR Ganto Nagari 1954 menggunakan dasar akrual yang sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.

Aset

a. Kas

Dalam perlakuan akuntansi pada PT. BPR Ganto Nagari 1954, pengakuan dan pengukuran transaksi kas diakui sebesar nilai nominal. Penyajian kas disajikan dalam pos tersendiri dan hal yang diungkapkan yaitu rincian jumlah kas.

b. Kas dalam valuta asing

Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, pos kas dalam valuta asing tidak dilengkapi dengan nilai nominal pada aktualisasinya belum terjadi transaksi terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.

c. Sertifikat Bank Indonesia

Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, pos Sertifikat Bank Indonesia tidak dilengkapi dengan nilai nominal pada aktualisasinya belum terjadi transaksi terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.

d. Pendapatan bunga yang akan diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima entitas berasal dari pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP, bunga harus diakui secara akrual.

e. Penempatan pada bank lain

Dalam perlakuan akuntansi pada PT. BPR Ganto Nagari 1954, pengakuan dan pengukuran giro, tabungan dan deposito diakui sebesar nilai nominal sedangkan sertifikat deposito diakui sebesar nilai perolehan. Penyajian tabungan dan deposito disajikan sebesar nilai nominal. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP yaitu penempatan pada bank lain dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan yaitu kelancaran aktivitas operasional.

f. Kredit

Kredit disajikan dineraca sebesar pokok kredit/baki debit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Penyisihan kerugian berasal dari penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Saldo penyisihan kerugian kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP karena memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan mempunyai nilai atau yang dapat diukur dengan andal.

g. Agunan yang diambil alih

Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, pos agunan yang diambil alih tidak dilengkapi dengan nilai nominal pada aktualisasinya belum terjadi transaksi terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.

h. Aset tetap dan inventaris

Dalam perlakuan akuntansi PT. BPR Ganto Nagari 1954, pada saat pengakuan awal aset tetap dan inventaris diakui sebesar biaya perolehan. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.

i. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehan. Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, pos aset tidak berwujud tidak dilengkapi dengan nilai nominal pada aktualisasinya belum terjadi transaksi terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.

j. Aset lain-lain

Aset lain-lain diakui pada saat terjadinya transaksi sebesar biaya perolehan. Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca. Hal yang harus diungkapkan yaitu rincian aset lain-lain dan kebijakan akuntansi. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP karena memiliki manfaat di masa akan datang dan biaya dapat dihitung secara andal.

Kewajiban

a. Kewajiban segera

Dalam perlakuan akuntansi PT. BPR Ganto Nagari 1954, pengakuan dan pengukuran transaksi kewajiban segera diakui pada saat kewajiban telah jatuh tempo dan kewajiban segera disajikan sebesar jumlah yang harus disajikan. Hal yang harus diungkapkan yaitu rincian kewajiban segera dan penjelasan untuk kredit yang bersaldo kredit. Pada pos kewajiban segera PT. BPR Ganto Nagari 1954 sudah sesuai dengan SAK ETAP.

b. Utang bunga

Dalam perlakuan akuntansi PT. BPR Ganto Nagari 1954, utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus disajikan. Hal yang harus diungkapkan pada pos utang bunga yaitu rincian utang bunga yang berasal dari akrual bunga bunga jatuh tempo dan rincian utang bunga kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BPR. Pada pos utang bunga sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.

c. Utang pajak

Dalam perlakuan akuntansi PT. BPR Ganto Nagari 1954, utang pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas Negara dan disajikan sebesar jumlah yang harus disajikan. Hal yang harus diungkapkan yaitu kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi keperiode berikutnya dan rincian komponen utama beban pajak penghasilan. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.

d. Simpanan

Dalam perlakuan akuntansi pada PT. BPR Ganto Nagari 1954, transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan penabung dan saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan, sedangkan transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito dan deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.

e. Simpanan dari bank lain

Dalam perlakuan akuntansi simpanan dari bank lain pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 yaitu transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang

dilakukan oleh bank lain dan saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan, sedangkan transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito dan deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan. Hal ini memiliki manfaat bagi entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal, berarti pada pos simpanan dari bank lain sudah sesuai dengan SAK ETAP.

f. Pinjaman yang diterima

Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, pos pinjaman diterima tidak dilengkapi dengan nilai nominal pada aktualisasinya belum terjadi transaksi terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.

g. Dana setoran modal-kewajiban

Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, pos dana setoran modal-kewajiban tidak dilengkapi dengan nilai nominal pada aktualisasinya belum terjadi transaksi terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.

h. Kewajiban imbalan kerja

Dalam perlakuan akuntansi kewajiban imbalan kerja pada PT. BPR Ganto Nagari 1954, kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos kewajiban segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan.

i. Pinjaman subordinasi

Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, pos pinjaman subordinasi tidak dilengkapi dengan nilai nominal pada aktualisasinya belum terjadi transaksi terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.

j. Modal pinjaman

Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, pos modal pinjaman tidak dilengkapi dengan nilai nominal pada aktualisasinya belum terjadi transaksi terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.

k. Kewajiban lain-lain

Dalam perlakuan akuntansi pada pos kewajiban lain-lain PT. BPR Ganto Nagari 1954, kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan pada pos kewajiban lain-lain yaitu rincian kewajiban lain-lain. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.

Ekuitas

a. Modal

Dalam perlakuan akuntansi, penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BPR dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Tambahan modal disetor (agio saham) diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non-kas dan tambahan modal disajikan dalam kelompok ekuitas. Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non-kas dari pemilik dan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun tambahan modal disetor. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.

b. Dana setoran modal-ekuitas

Dana setoran modal yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku direklasifikasi dari kewajiban ke ekuitas sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Dana setoran modal-ekuitas disajikan dalam pos tersendiri setelah pos modal. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP bahwa entitas memberikan laporan mengenai ekuitas sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas.

c. Laba/rugi yang belum direalisasi

Dalam perlakuan akuntansi, laba/rugi yang belum direalisasi dari surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual diakui pada tanggal pelaporan dan disajikan sebagai pos terpisah dalam ekuitas. Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, pos pinjaman subordinasi tidak dilengkapi dengan nilai nominal pada aktualisasinya belum terjadi transaksi terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.

d. Surplus revaluasi aset tetap

BPR dalam melakukan penilaian kembali aset tetap dan inventarisnya, maka selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat sebelum dilakukan revaluasi dicatat pada pos surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi aset tetap dicatat sebagai pos tersendiri dalam ekuitas.

e. Saldo laba

Saldo laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan umum, cadangan tujuan, dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya.

Kebijakan Akuntansi Penyusunan Neraca pada PT. BPR Ganto Nagari 1954

Sesuai dengan hasil pernyataan yang telah diisi oleh orang yang bertanggungjawab (bagian keuangan dari PT. BPR Ganto Nagari 1954), maka penulis dapat mendiskripsikan bahwa:

1. Terdapat 15 pernyataan yang masih belum diterapkan pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 yang terdiri atas 6 item pengakuan, 4 item penyajian, dan 5 item pengungkapan.
2. 6 item pengakuan yaitu 40% dari jumlah pernyataan yang belum diterapkan, item tersebut berhubungan dengan akun yaitu:
 - Aset tetap dan inventaris
 - Simpanan
 - Simpanan dari Bank lain
 - Kewajiban imbalan kerja
 - Modal
3. 4 item penyajian yaitu 26,7% dari jumlah pernyataan yang belum diterapkan, item tersebut berhubungan dengan akun:
 - Penempatan bunga yang akan dan penempatan pada Bank lain
 - Penyisihan kerugian dan penghentian pengakuan
 - Kewajiban imbalan kerja
4. 5 item pengungkapan yaitu 33,3% dari jumlah pernyataan yang belum diterapkan, item tersebut berhubungan dengan akun:
 - Pendapatan bunga yang akan diterima dan penempatan pada Bank lain
 - Aset tetap dan inventaris
 - Modal

Berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan oleh penulis, dari 126 item pernyataan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi BPR terdapat 15 item yang tidak diterapkan oleh PT. BPR Ganto Nagari 1954 yaitu 6 item pengakuan, 4 item penyajian, dan 5 item pengungkapan, yang artinya penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR yang telah disesuaikan dengan SAK ETAP sudah diterapkan pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 sebesar 88% tapi masih belum sepenuhnya diterapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa:

1. Peneliti telah melakukan perbandingan antara penyajian neraca menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan penyajian neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, dalam penyusunan neraca pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR yaitu PT. BPR Ganto Nagari sudah melengkapi pos-pos umum yang harus disajikan dalam neraca seperti pos-pos yang terdapat dalam akuntansi aset, kewajiban dan ekuitas.
2. Berdasarkan pada Pedoman Akuntansi BPR yang telah disesuaikan dengan SAK ETAP terdapat tiga pokok kebijakan akuntansi yang berlaku dalam neraca adalah tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pos-pos yang ada pada neraca. Sesuai dengan hasil pernyataan yang ditulis berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR telah diisi oleh orang yang bertanggungjawab (bagian keuangan dari PT. BPR Ganto Nagari 1954), terdapat 126 pernyataan yang diantaranya ada beberapa pernyataan yang belum diterapkan pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 yang terdiri atas 6 item pengakuan, 4 item penyajian dan 5 item pengungkapan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan untuk PT. BPR Ganto Nagari 1954 yaitu seharusnya dalam penyusunan Laporan Keuangan khususnya Neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954 lebih mematuhi dan menerapkan Pedoman Akuntansi BPR yang telah disesuaikan dengan SAK ETAP sepenuhnya agar Neraca yang disajikan jelas sehingga dapat dipahami, relevan, diandalkan dan dapat dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. www.bi.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_82606.aspx. Diakses 20 Oktober 2016.
- _____. 2009. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU-Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi bagi Bank Perkreditan Rakyat. www.bi.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_82606.aspx. Diakses 20 Oktober 2016.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Irmayanto, Juli, dkk. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Manurung, Sofyan dan Prathama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. 2010. Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. IAI. Diunduh 20 Oktober 2016.